

TRADISI ISLAM DI INDONESIA SEBAGAI SUMBER SUBSTANSIASI IDEOLOGI

Oleh Nurcholish Madjid

Setiap bangsa mempunyai etos atau suasana kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam berbagai bentuk perwujudan, seperti jati diri, kepribadian, dan ideologi. Khusus pada zaman modern ini, perwujudan etos ini dalam bentuk perumusan formal yang sistematis menghasilkan ideologi. Berkenaan dengan bangsa kita, Pancasila dapat dipandang sebagai perwujudan etos nasional dalam bentuk perumusan formal, sehingga sudah semestinya bahwa Pancasila disebut sebagai ideologi nasional. Dan penyebutan ini sudah lazim kita terima.

Tetapi, Pancasila adalah sebuah ideologi modern. Hal itu tidak saja karena ia diwujudkan dalam zaman modern, tetapi juga—dan ini yang menjadi alasan utama—karena ideologi Pancasila ini ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan modern, yaitu para bapak pendiri Republik Indonesia. tujuan mereka menampilkan ideologi Pancasila ini adalah untuk memberi landasan filosofis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia. Sebagai produk pikiran modern, Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis, dan memang harus dipandang demikian. Watak dinamis Pancasila itu membuatnya sebagai ideologi terbuka. Presiden Soeharto pernah menegaskan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka itu

pada beberapa kesempatan, antara lain pada Kongres dan Seminar Nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS) di Ujungpandang, 15 Desember 1986.

Dalam hal perumusan formalnya, Pancasila tidak perlu lagi dipersoalkan. Demikian pula kedudukan konstitusionalnya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam pluralitas Indonesia, juga—meminjam ungkapan Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Ra'is 'Amm Nahdlatul 'Ulama—merupakan hal yang final. Namun, dari segi pengembangan prinsip-prinsipnya sehingga menjadi aktual dan relevan bagi masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, Pancasila tidak bisa tidak kecuali harus dipahami dan dipandang sebagai ideologi terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, tidak mungkin ia dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk selama-lamanya (*once for all*). Pancasila juga tidak mengizinkan adanya badan tunggal yang memonopoli hak untuk menafsirkannya, sebagaimana dalam contoh-contoh masyarakat totaliter seperti negara komunis (yang kini sedang runtuh itu) selalu menjadi sumber manipulasi ideologis dan menjadi agen yang selalu siap membenarkan praktik-praktik kekuasaan yang sewenang-wenang dan zalim. Otoriterisme dalam sejarah selalu dimulai oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengaku sebagai pemegang kewenangan tunggal di suatu bidang yang menguasai kehidupan orang banyak, khususnya dibidang ideologi politik.

Konsekuensi logis akibat deretan argumen itu ialah bahwa masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan mengambil bagian aktif dalam usaha-usaha menjabarkan nilai-nilai ideologi nasional itu dan mengaktualkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Setiap usaha menghalanginya akan menjadi sumber malapetaka, tidak saja bagi negara dan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk, tetapi juga bagi ideologi nasional itu sendiri sebagai titik-tolak pengembangan pola hidup bersama.

Islam di Indonesia

Sudah menjadi bagian dari retorika di negeri kita ini bahwa Islam adalah agama mayoritas. Retorika itu malah menyebutkan angka 90 sebagai persentasi kaum Muslim dari seluruh penduduk negeri, tanpa pernah dipersoalkan dari mana asal-usul angka itu selain hanya perkiraan dan kesan. Karena kuatnya efek retorika itu, maka ketika sensus menunjukkan angka kaum Muslim Indonesia kurang (sedikit) dari 90 persen, timbullah berbagai tafsiran terhadap kehidupan keagamaan masyarakat kita, baik berdasarkan fakta maupun fiksi. Walaupun begitu, Islam memang merupakan agama terbesar penganutnya di negara kita, terlepas dari apa pun makna penganutan mereka terhadap agama itu dan betapa pun beranekanya tingkat intensitas penganutan itu dari kelompok ke kelompok dan dari daerah ke daerah. Namun, kenyataan sederhana ini kiranya sudah cukup memberi alasan keabsahan bagi pembicaraan tentang Islam di negeri kita dan perannya dalam substansiasi ideologi nasional, tentunya tanpa eksklusivisme dan tidak dalam semangat kesewenangan suatu kelompok besar.

Tetapi, sebelum melangkah lebih jauh dalam pembicaraan tentang pokok persoalan ini, dirasa ada manfaatnya menelaah sejenak keadaan Islam di Indonesia. Telaah yang benar-benar komprehensif tentu tidak mungkin, sehingga yang bisa dilakukan di sini ialah sekadar mengemukakan beberapa masalah menonjol atau *highlights* yang dianggap relevan.

Di antara berbagai ekspedisi militer Islam, yang termasuk sangat gemilang ialah ekspedisi dalam membebaskan (*fath*) Semenanjung Iberia (Spanyol dan Portugis) serta penaklukan Lembah Sungai Indus (Anak Benua India sebelah Utara), kedua-duanya terjadi pada tahun 711 Masehi, di masa pemerintahan Khalifah Umawi al-Walid ibn 'Abd al-Malik (khalifah yang membangun kembali Masjid Aqsha yang masih ada sampai sekarang). Sekitar 100 tahun setelah itu, Pulau Jawa menyaksikan kesibukan luar biasa, yaitu pembangunan tempat suci dan monumen keagamaan Budhisme

yang amat megah, yaitu Borobudur. Dan sekitar seabad lagi setelah itu kesibukan luar biasa terjadi lagi, berhubung dengan pembangunan tempat suci dan monumen keagamaan Hinduisme yang juga sangat mengesankan, yaitu Candi Lara Jonggrang (Prambanan).

Kemudian tepat empat ratus tahun setelah pembebasan Iberia dan Hindustan itu, yaitu pada tahun 1111 Masehi, seorang pemikir besar Islam, al-Ghazali, wafat. Lintasan sejarah ini sangat menarik, mengingat bahwa nama al-Ghazali sering disebut-sebut dalam kaitannya dengan anti klimaks peradaban Islam. Dan tentu lebih menarik lagi untuk diketahui bahwa ketika al-Ghazali sibuk dengan polemik-polemiknya tentang filsafat, boleh dikatakan kepulauan Nusantara sebagai keseluruhan belum mengenal Islam. Jika kita ambil pulau Jawa sebagai contoh, maka kita dapatkan bahwa al-Ghazali hidup beberapa dasawarsa sebelum tampilnya Raja Jayabaya dari Kediri.

Memang tidak adil untuk begitu saja menilai, apalagi menuduh, seorang tokoh yang amat berjasa seperti al-Ghazali sebagai penyebab kemunduran Islam. Tetapi kenyataannya ialah bahwa setelah abad ke-12 itu, peradaban Islam, khususnya yang berada dalam lingkungan budaya Arab, memang menunjukkan garis menurun. Sedangkan di luar lingkungan Arab, khususnya dalam lingkungan budaya Persi, peradaban Islam itu masih menunjukkan vitalitasnya dan perkembangan lebih lanjut yang cukup menakjubkan, terbukti dengan tampilnya tiga kemaharajaan mesiu (*gunpowder kingdoms*) setelah itu, yaitu Mogul di India, Safawi di Persia, dan Utsmani atau Ottoman di Turki.

Lebih menarik lagi ialah bahwa ketika sedang giat-giatnya dilakukan usaha pembebasan India Selatan oleh kekuasaan Islam dari India Utara serta pada saat-saat permulaan perkembangan Turki Utsmani, kawasan Nusantara masih menyaksikan bangkitnya kekuasaan Hindu yang hebat, yaitu Majapahit (tepatnya pada tahun 1293). Seperti kita ketahui, banyak dari unsur-unsur

mitologi Majapahit itu yang masih bertahan atau dipertahankan dalam masyarakat Indonesia modern.

Beberapa kenyataan historis itu dipaparkan di sini untuk menunjukkan betapa pengenalan Nusantara secara keseluruhan—kecuali daerah-daerah tertentu seperti Aceh, misalnya—kepada agama dan peradaban Islam itu relatif belum lama. Jika kita bandingkan dengan India Utara, pengenalan Nusantara kepada Islam adalah sekitar tujuh atau delapan abad lebih kemudian. Ini berdasarkan pendapat banyak ahli bahwa Islam mulai masuk secara efektif di Nusantara, khususnya di Semenanjung Melayu Selatan dan di kota-kota pantai pulau-pulau besar, pada akhir abad ke-15, mengikuti masuknya Raja Malaka ke agama Islam pada awal abad itu.

Kehadiran Islam itu, di beberapa tempat, mendorong terjadinya perubahan pola kekuasaan dan melahirkan kesatuan-kesatuan politik Islam dalam bentuk kesultanan-kesultanan. Agama Islam juga membawa berbagai pandangan baru yang revolusioner untuk masa itu. Dapat disebutkan dua hal yang amat penting di sini. *Pertama*, ialah sifat Islam sebagai agama egaliter radikal, yang antara lain berakibat pada penyudahan sistem kasta dalam masyarakat Hindu Nusantara dan penghentian praktik *sati* (keharusan seorang janda untuk terjun ke dalam api yang juga digunakan untuk membakar jenazah suaminya—yang akhir-akhir ini, sungguh ironis, dicoba dihidupkan kembali oleh kaum Hindu fundamentalis di India). *Kedua*, agama Islam dengan kesadaran hukumnya yang amat kuat (kesadaran syariat dalam makna sekundernya) telah melengkapi penduduk Nusantara khususnya para pedagang, dengan sistem hukum yang berjangkauan internasional, yang mampu mendukung kegiatan perdagangan dalam konteks ekonomi global yang saat itu sedang berada dalam kekuasaan Islam.

Tetapi, kekuasaan politik Islam di Nusantara belum pernah bisa mencapai kebesaran dan kehebatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh kekuasaan politik Budhisme Sriwijaya dan

Hinduisme Majapahit. Apalagi tidak lama setelah Islam mulai hadir di Nusantara ini bangsa-bangsa Barat juga mulai berdatangan. Mula-mula agaknya mereka hanya bermaksud mengembangkan perdagangan sebagai kelanjutan dorongan Merkantilisme Eropa setelah pengenalan mereka dengan Dunia Islam. Tetapi, kemudian ternyata mereka tidak cukup puas dengan hanya melakukan perdagangan, dan mulai melakukan praktik-praktik penjajahan dan imperialisme.

Keserakahan bangsa-bangsa Barat itu dengan sendirinya mendapatkan perlawanan sengit dari penduduk yang tinggal di Nusantara. Dengan adanya perlawanan ini, kehadiran agama Islam dinilai tepat pada waktunya, karena Islam mampu dan dibutuhkan untuk melengkapi penduduk Nusantara dengan ideologi yang segar dan tegar untuk menghadapi dan melawan bangsa-bangsa Barat itu (sebanding dengan Marxisme sebagai kelengkapan ideologis bangsa-bangsa terjajah dalam melawan para penjajah mereka pada abad ke-20 ini). Oleh karena itu, sementara ahli melihat kehadiran bangsa-bangsa Barat di Nusantara merupakan *mixed blessing* bagi Islam. Di satu sisi, karena fungsinya sebagai kelengkapan ideologis yang sedang diperlukan oleh penduduk Nusantara dalam menghadapi bangsa-bangsa Barat itu sendiri, maka kehadiran kaum penjarah itu justru mempercepat penyebaran agama Islam ke hampir seluruh pelosok. Sedangkan di sisi lain, justru keterlibatannya langsung dalam menghadapi dan melawan kaum penjarah dari Barat itu—biar pun dengan menggunakan bendera Islam—membuat persepsi sebagian besar penduduk Nusantara kepada agama Islam menjadi bersifat sangat politis, yaitu dalam fungsinya sebagai ideologi politik. Dan ini menyebabkan persepsi mereka terhadap Islam sebagai agama *an sich* yang amat mendalam menjadi banyak tertunda. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian muncul kesan yang umum dipunyai para pengamat bahwa Islam di Nusantara itu lemah dari segi pemahaman dan penghayatan para pemeluknya terhadap ajaran agama itu, bahkan dianggap lebih lemah daripada

pemahaman dan penghayatan para pemeluk agama itu di India pada saat-saat kelemahannya.

Dalam masalah keislaman ini, India memang menyediakan bahan perbandingan yang cukup menarik bagi Indonesia. Sementara di India, baik sebagai negeri merdeka sekarang ini (dengan nama resmi Bharat), maupun sebagai anak benua yang juga meliputi Pakistan dan Bangladesh (British India), para pemeluk Islam selama ini merupakan golongan minoritas. Namun, agama Islam telah secara amat jauh mempengaruhi pola-pola budaya penduduk, bahkan pengaruh ini sampai kepada mereka yang beragama Hindu.¹ Kuatnya penetrasi budaya Islam di Anak Benua India ini tercermin dalam jumlah bangunan-bangunan Islam yang megah, yang kini menjadi obyek turisme India modern. Sementara itu, kuil-kuil Hindu-Budha tidak memiliki daya tarik sekuat bangunan-bangunan Islam itu. Dan sebaliknya, lemahnya penyerapan budaya Islam di Indonesia tercermin dari masih tetap pentingnya fungsi bangunan-bangunan megah Hindu-Budha sebagai obyek turisme Indonesia modern, sementara bangunan-bangunan Islam sendiri hampir tidak berarti.²

¹ Kenyataan ini terlihat, misalnya, dalam Kerajaan Hindu Vijayanagar yang meskipun bertahan dengan Hinduismenya namun menyadarkan diri dari tentara Muslim dan menggunakan tata cara Islam dalam lingkungan istana (*lih.* Marshall Hodgson, *The Venture of Islam* [America: The University of Chicago Press, 1974], jilid 2, h. 532).

² Oleh karena itu, sering tampak adanya hal-hal yang *anomalous* atau menyimpang tentang India dan Indonesia dalam kaitannya dengan Islam ini. Disebabkan oleh perkembangan sejarahnya yang paling akhir sekitar masa-masa pembentukan negara, Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim sering menunjukkan sikap-sikap terhadap Islam yang mengandung stigma politik. Bagi India, Islam tidaklah mengandung serupa, selain kaitannya dengan masa-masa partisi yang melahirkan Pakistan (kemudian kelak juga Bangladesh), namun lambat laun India mampu melihatnya sebagai lebih banyak masalah kebangsaan, bukan keagamaan. Karena itu ketika pada masa permulaan pembentukannya, OKI (Organisasi Konferensi Islam) tidak mengikutkan India sebagai anggota (padahal mempunyai jumlah kaum Muslim yang tidak kurang dari 80 jutaan), Perdana Menteri Indira Gandhi waktu itu mengajukan protes dan menuntut agar India diterima sebagai

Sudah tentu semua kenyataan tersebut, ditambah dengan banyak kenyataan lain yang tidak mungkin dijabarkan seluruhnya di sini, mempunyai akibat-akibat yang cukup jauh dan kontradiktif. Salah satunya ialah bahwa sementara Indonesia merupakan kesatuan bangsa Muslim terbesar di muka bumi, namun kontribusi kultural dan, lebih-lebih lagi, intelektualnya sangat jauh di bawah proporsinya. Dalam bidang intelektual itu boleh dikatakan bahwa kaum Muslim Indonesia hanya menjadi konsumen untuk produk-produk pemikiran dari anak benua India sampai ke produk pemikiran Barat. Ini dengan mudah dapat dilihat dalam kuantitas komparatif kepustakaan ilmiah Islam di Indonesia dan di negeri-negeri lain, belum lagi kalau dilihat dari segi kualitas komparatifnya, misalnya dari segi orisinalitas suatu kontribusi intelektual.

Berdasarkan pada itu semua, maka kiranya cukup beralasan adanya suatu pandangan yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia sesungguhnya masih dalam tahap perkembangan dan pembentukannya, dan masih sedang menyiapkan masa depannya secara sangat menentukan. Dapat pula dikatakan bahwa umat Islam Indonesia sekarang ini betul-betul baru pada tahap permulaan mengecap hasil perjuangan mereka sendiri selama berabad-abad melawan dan menghalau penjajah. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa fungsi Islam di Nusantara adalah sebagai kelengkapan ideologis menghadapi penjajah yang datang dari Barat. Dan bila kita hubungkan antara fungsi Islam ini dengan tradisi dan sejarah panjang semangat perlawanan terhadap para penjajah Barat itu, secara alami membuat kaum Muslim sebagai

anggota. Tetapi pengalaman Indonesia sama sekali lain. Menteri Luar Negeri Adam Malik dibuat repot menerangkan bahwa Indonesia bukanlah anggota OKI, melainkan hanya sebagai peninjau. Ini adalah karena adanya suara-suara keberatan atas keanggotaan Indonesia dalam OKI, sekalipun mayoritas penduduknya penganut Islam. Tentu saja sekarang persoalannya sudah rampung: India tetap tidak masuk OKI, dan Indonesia menjadi anggota penuh dengan peranan semakin penting di dalamnya.

yang paling berkepentingan terhadap kemerdekaan. Ini dinyatakan secara simbolik oleh kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, sebagai Ra'is Akbar Masyumi (sebelum malapetaka perpecahan partai ini), yang atas nama para '*ulamā*' seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa membela dan mempertahankan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 adalah perang suci di jalan Allah dan tewas di dalamnya adalah kesyahidan (*syahādah*). Fatwa inilah yang sangat membantu membuat peristiwa 10 November di Surabaya begitu heroik yang kemudian ditetapkan sebagai hari Pahlawan bangsa Indonesia.

Peran Historis Warga yang Bersemangat Keislaman

Partisipasi warga Indonesia yang bersemangat keislaman dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu sangat menentukan, sehingga para pendiri Republik ini secara arif bijaksana mengenangnya dengan mendirikan monumen Syuhada (Tugu Pahlawan) dan masjid Istiqlal (kemerdekaan). Dengan jelas kedua monumen itu melambangkan pengakuan tentang adanya keindonesiaan dengan keislaman, serta antara kemerdekaan dengan peran besar warga negara yang bersemangat keislaman. Hal itu akan tetap demikian tanpa bisa diubah lagi, meskipun mungkin peran warga negara dengan semangat keislaman itu dalam fase-fase yang lebih memerlukan keahlian teknis dan pengelolaan (managerial) sangat di bawah proporsi.

Tetapi, jika kita mengetahui bahwa kurangnya peran mereka di bidang ini ialah karena rendahnya atau malah tidak adanya pendidikan modern Belanda bagi mereka—pada masa penjajahan Belanda—dibandingkan dengan warga lain yang lebih “beruntung”, maka sesungguhnya adalah suatu ironi jika kita tidak justru menunjukkan sikap penuh hormat kepada mereka. Sebab tidak adanya pendidikan modern Belanda pada mereka adalah justru akibat patriotisme mereka yang berkobar-kobar, yang

membuat mereka selalu menempuh jalan tidak kenal kompromi terhadap Belanda, termasuk tidak kenal kompromi dalam bidang pendidikan dan budaya pada umumnya. Dan keadaan itu menjadi lebih parah lagi karena pemerintah kolonial justru bersikap diskriminatif terhadap mereka, yaitu dengan mengingkari hak-hak mereka, termasuk dan terutama hak untuk memperoleh pendidikan yang wajar. Warga negara yang bersemangat keislaman itu sedikit tertolong untuk suatu jangka waktu tertentu, yaitu dengan bergabungnya sejumlah kecil warga yang berpendidikan Belanda pada kelompok mereka. Warga yang berpendidikan Belanda ini datang dari keluarga dengan latar belakang sosio-kultural yang diuntungkan dan disenangi (*favourable*) dalam sistem masyarakat kolonial Hindia Belanda.

Tetapi, karena bagaimanapun juga proses itu kurang wajar, maka sulit dihindari timbulnya problem legitimasi kepemimpinan intern lembaga yang menghimpun warga bersemangat keislaman itu sebagai akibat rongrongan atas pertumbuhan dan pengembangan kemampuannya. Dan karena ketidakwajaran itu—yang bisa kita ibaratkan sebagai sistem pembudidayaan tanaman melalui okulasi—maka justru setelah pohon itu besar kemungkinan tumbang atau patah batangnya semakin besar, dan memang begitu-lah yang terjadi sebagaimana keprihatinan semua pihak. Tetapi, karena sifat dan fungsi warga yang bersemangat keislaman itu sebagai tulang-punggung dan inti (*core*) sistem kemasyarakatan (*societal system*) di Indonesia, maka lambat ataupun cepat mereka akan mewujudkan peran itu di semua bidang kehidupan, sambil untuk sementara ini dan mungkin selamanya akan tetap berfungsi sebagai reservoir patriotisme yang sewaktu-waktu maju ke depan memenuhi panggilan tanah air. Peran mereka ini berkali-kali telah terbukti dan contoh terakhir yang bisa kita kaji adalah bagaimana mereka memenuhi panggilan tanah air untuk menghancurkan kaum komunis, yang kemudian mengantarkan bangsa kita memasuki Orde Baru sekarang ini. Dengan partisipasi penuh dalam pendidikan modern dan dalam semua segi kehidupan

nasional lainnya, para warga yang bersemangat keislaman itu sekarang sedang mengumpulkan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman teknis yang amat diperlukan bagi terlaksananya peran pada tingkat yang lebih tinggi dan menentukan di masa mendatang.

Halangan psikologi-politik warga bersemangat keislaman untuk ikut serta sepenuhnya dalam pendidikan modern mulai menipis baru sejak tahun 1950. Menipisnya halangan ini berkat adanya kesepakatan antara Menteri Agama, A. Wahid Hasyim, dan Menteri P dan K, Bahder Djohan (pada waktu itu dalam kabinet Natsir dari Masyumi) untuk mengadakan mata pelajaran umum di sekolah-sekolah agama dan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Kesepakatan kedua menteri itu telah terbukti menjadi titik-tolak proses dan perjalanan kedua sistem pendidikan Indonesia (“madrasah” dan “sekolah”) menuju ke arah titik-temu atau konvergensi. Dan titik-temu serta konvergensi itu saat-saat sekarang sudah mulai dengan jelas menunjukkan wujud konkretnya, seperti dengan sangat meningkatnya kegairahan kepada pendidikan dan kajian keislaman di lembaga-lembaga pendidikan umum. Sebaliknya ilmu-ilmu pengetahuan modern tidak lagi terasa asing di lembaga-lembaga pendidikan keislaman. Jika kecenderungan ini berlanjut terus dengan baik, maka tidak mustahil Indonesia akan memiliki sistem pendidikan tunggal yang lebih efektif akibat terjadinya konvergensi total kedua sistem pendidikan tersebut. Dan itu berarti bahwa sesungguhnya hari-hari ini kita sedang menyaksikan berlangsungnya proses pertumbuhan bangsa kita—melalui segi tertentu sistem pendidikan kita yang bersangkutan dengan rasa keabsahan—menuju pada fase baru perkembangan nasional dengan identitas kultural yang lebih sejati dan menyiapkan pangkal-tolak yang kukuh untuk “lepas landas” (meminjam ungkapan atau jargon politik paling umum dewasa ini).

Berbicara mengenai Islam dan substansiasi ideologi dan etos nasional, kita perlu mengingat bahwa ideologi nasional Pancasila,

meminjam ungkapan Kiai Ahmad Shiddiq, adalah sudah final berkenaan dengan fungsinya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam konteks kemajemukan Indonesia. Kefinalan ideologi nasional itu juga berkenaan dengan perumusan atau pengkalimatan formalnya sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45.

Kalau kita kaji suasana historisnya, kita akan mengetahui bahwa proses menuju kepada kefinalan itu telah sempat menimbulkan polemik dan kontroversi yang tajam dalam masyarakat, terutama diwakili oleh kalangan elit penguasa pada waktu itu. Kini dengan lega hati kita menyaksikan bahwa sebagian besar dari rasa kekhawatiran yang ada di balik polemik dan kontroversi itu ternyata tidak terbukti. Bahkan bisa dikatakan terdapat tanda-tanda tentang adanya perkembangan yang lebih positif daripada yang diduga semula.

Tetapi, untuk memperoleh gambaran yang lebih transparan mengenai garis argumen yang menimbulkan polemik dan kontroversi ini kita perlu menyinggung dan menelaah beberapa hal. Banyak dari kekhawatiran di balik sikap enggan menerima kefinalan Pancasila (dalam pengertian Kiai Ahmad Shiddiq itu) sebagai ideologi nasional kita timbul dari dugaan bahwa Pancasila akan diarahkan kepada posisi sebagai padanan (*equivalent*), bahkan malah dianggap menjadi saingan bagi suatu agama. Atau, lebih sederhananya, Pancasila “akan diagamakan” menggantikan suatu agama atau agama-agama yang ada. Secara *common sense* (pikiran sehat) memang segera tampak oleh kebanyakan pengamat kemustahilan kekhawatiran terwujudnya gagasan serupa itu. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa dugaan yang mustahil itu telah pernah melatarbelakangi polemik dan kontroversi yang seru. Dan, sebagaimana telah dikatakan, ternyata kekhawatiran itu sama sekali tidak terbukti, malah justru banyak timbul gejala yang lebih positif.

Adanya kekhawatiran itu, meskipun pada akhirnya tidak terbukti, sebenarnya dapat dipahami, mengingat berbagai trauma

ideologis politis masa lalu yang dialami oleh sebagian dari masyarakat. Tetapi, dari sudut pandangan mereka yang bersemangat keislaman, kekhawatiran itu seharusnya tidak pernah terjadi, tidak saja akhir-akhir ini tapi juga di masa lalu yang lebih jauh, kalau saja terdapat kesadaran yang mantap bahwa Pancasila itu dari beberapa fungsi dan kedudukannya antara lain merupakan titik-temu (*common platform*, *Kalimat-un sawā*) antara berbagai komunitas kemasyarakatan (*societal community*) dalam bangsa kita, terutama komunitas keagamaan. Dan dalam ajaran Islam, pencarian titik-temu antara berbagai agama yang berkitab suci (agama-agama samawi) seharusnya tidak merupakan hal baru, karena hal itu telah menjadi perintah Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad saw:

“Katakanlah (olehmu Muhammad), ‘Wahai para pengikut kitab suci! Marilah kamu semua menuju kepada ajaran dasar kesamaan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah Tuhan Yang Mahaesa, dan bahwa sebagian dari kita—sesama manusia—tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah Tuhan Yang Mahaesa!’ Tetapi jika mereka, para pengikut kitab suci itu menolak, maka katakanlah olehmu sekalian (wahai kaum beriman), kepada para pengikut kitab suci itu, “bersaksilah kamu semua bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kaum Muslimin),” (Q 3:64).

Jadi dalam firman Allah itu ada beberapa penjelasan yang perlu kita perhatikan, *pertama*, adanya perintah mencari titik-temu antara para penganut berbagai agama berkitab suci; *kedua*, titik-temu itu ialah *tawhīd* atau paham Ketuhanan Yang Mahaesa (monoteisme); *ketiga*, *tawhīd* itu menurut konsekuensi tidak adanya pemitosan sesama manusia atau sesama makhluk; *keempat*, jika usaha menemukan titik-temu itu gagal atau ditolak, maka masing-masing harus diberi hak untuk secara bebas mempertahankan sistem keimanan yang dianutnya.

Pandangan bahwa *tawhīd* atau paham Ketuhanan Yang Mahaesa merupakan prinsip paling dasar yang mempertemukan agama-agama samawi dalam keasliannya dengan sangat kukuh menjadi pandangan sistem keislaman. Ini, misalnya, ditegaskan dalam firman Allah yang menjelaskan bahwa ajaran pokok para Nabi dan Rasul ialah bahwa mereka tidak menyembah sesuatu apa pun kecuali Allah, Tuhan Yang Mahaesa: “*Dan Kami (Allah) tidak pernah mengutus seorang Rasul pun kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan selain Aku. Maka sembahlah olehmu semua akan Daku saja,*” (Q 21:25).

Sekali lagi, dalam firman itu titik-temu antara agama-agama yang diperintahkan Tuhan untuk mengajak para pemeluk menuju kepadanya ialah paham Ketuhanan Yang Mahaesa. Sepanjang mengenai Pancasila, adalah tepat bahwa sila pertama itu, seperti yang diungkapkan oleh penyumbang pikirannya yang utama, Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah saat itu, dimaksudkan sebagai *tawhīd*. Lebih lanjut, mengikuti garis argumen dalam ilmu ushul fiqih, sesudah satu titik-temu yang paling pokok telah disetujui, kemudian masih dapat disetujui pula titik-temu lain yang dipandang baik oleh semua, maka tentulah hal itu lebih utama (*afḍlal*). Sebuah kaidah mengatakan, “*Mā kāna aktsara fi‘lan kāna aktsara faḍllan*” (sesuatu [dari perbuatan baik] semakin banyak dikerjakan, semakin banyak pula keutamaannya).

Di depan telah ditandaskan bahwa sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, sesuai dengan rancangannya untuk landasan kehidupan sosial politik Indonesia yang plural dan modern. Suatu fase kemantapan nasional amat penting telah terjadi di negeri kita berkenaan dengan kefinalan Pancasila ini, yaitu diterimanya ideologi itu sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam konteks pluralisme dan keterbukaan. Tetapi, Presiden Soeharto sendiri mengingatkan bahwa kemantapan saja tidak cukup. Beliau katakan kepada para peserta Kongres dan Seminar HIPIS di Ujungpandang 1986, “Landasan ideologi yang

mantap saja masih belum cukup, tetapi kita harus membangun dan mengisinya dengan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan lahir batin. Hal itu berarti bahwa gambaran mengenai masyarakat hari esok yang berlandaskan Pancasila masih perlu kita jabarkan dan kita kembangkan lebih jauh”.

Kutipan itu memberi kejelasan singkat tentang apa makna pandangan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka. Yaitu bahwa ia tidak memberikan penafsiran secara detail dan nyata “sekali untuk selamanya”, tanpa bisa diubah-ubah. Jadi, ia tidak mengizinkan adanya indoktrinasi, yang telah diperlihatkan contohnya dalam negeri-negeri komunis sebagai kegagalan total. Melainkan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar harus senantiasa diusahakan digali dan dirinci tuntutan-tuntutan pokoknya dengan menghadapkan setiap konsep dan gagasan tentang makna idealnya kepada kenyataan-kenyataan masyarakat kita yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis. Dan jika diharapkan hasil yang optimal dari proses ini, maka dituntut adanya sistem sosial politik yang terbuka, yang memberi ruang bagi adanya kebebasan (yang bertanggung jawab) untuk menyatakan pendapat dan untuk menguji atau mengeksperimentasikan gagasan dan ide dalam masyarakat. Sebagaimana digariskan dalam Q 103, tidaklah cukup bagi manusia untuk lepas dari kehinaan dan kesengsaraan hanya dengan adanya komitmen pribadi melalui iman dan usaha mewujudkan komitmen pribadi itu secara sosial melalui perbuatan. Tetapi, di sini ia masih perlu menempatkan dirinya dalam tatanan masyarakat yang membuka kemungkinan adanya kebebasan saling menyatakan tentang apa yang baik dan mengadakan kerja sama dalam bentuk saling mengingatkan. Juga perlu diperhatikan untuk saling memberi nasihat tentang keharusan bersifat tabah dan ulet dalam usaha bersama menciptakan kehidupan yang baik.

Di antara berbagai kenyataan sosial di Indonesia ialah, sebagaimana telah dijabarkan, kenyataan Islam sebagai agama yang terbanyak pemeluknya tidaklah dapat kita pungkiri lagi. Ini mengakibatkan adanya dua konsekuensi yang saling terkait

dengan erat. *Pertama*, ialah keharusan penguasa—dalam hal ini pemerintah—memperhatikan aspirasi mereka (umat Islam Indonesia) itu. Konsekuensi ini, sebagaimana telah dikemukakan, merupakan inti sistem kemasyarakatan kita. Mencoba mengabaikan kepentingan mereka akan merupakan tindakan melawan arus realita, dan karenanya akan sangat berbahaya. Dalam perspektif ini kita harus memahami pandangan yang pernah dikemukakan Bapak Ismail Saleh, Menteri Kehakiman (dalam Kabinet Pembangunan V), tentang “Eksistensi Hukum Islam dan Sumbangannya terhadap Hukum Nasional”.³ Dan dari sudut pandangan itu kita juga dapat memahami pendapat Dr. Baharuddin Lopa bahwa peradilan di Indonesia di masa depan akan lebih banyak berdasarkan ajaran-ajaran Islam.⁴

Kedua, dan ini merupakan akibat yang jauh lebih berat. Yaitu bahwa kaum Muslimin memikul tanggung jawab pembinaan yang sangat besar, yang tidak cukup hanya dengan komitmen yang berkobar saja, tetapi mereka dituntut menguasai keahlian yang tinggi, baik tentang ajaran Islam sendiri maupun tentang konteks ruang dan waktu Indonesia modern. [❖]